

## Konsep Kesejahteraan Dalam Filsafat Ekonomi: Dari Ukuran Pendapatan Hingga Kualitas Hidup Masyarakat Lampung

<sup>1</sup>Ida Wati

<sup>1</sup>Perbankan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah (STIES) Alifa Pringsewu, Indonesia

[IDAmiyora@gmail.com](mailto:IDAmiyora@gmail.com)

Corresponding Author: [\\*IDAmiyora@gmail.com](mailto:IDAmiyora@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini berfokus pada asal-usul teoretis konsep kesejahteraan, keterbatasan pendapatan sebagai indikator tunggal kualitas hidup, serta peran aspek kesehatan, pendidikan, keamanan, dan kebebasan sebagai elemen inti dalam memahami kesejahteraan secara holistik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pergeseran pandangan kesejahteraan dalam kerangka filsafat ekonomi dari pendekatan yang berpusat pada pendapatan menuju penilaian yang lebih multidimensional. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Provinsi Lampung, pergeseran pola pikir ini tercermin dalam meningkatnya penggunaan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai tolok ukur kesejahteraan, di samping indikator pendapatan yang tetap digunakan. Selama periode pengamatan, tercatat kemajuan signifikan dalam pendapatan dan standar hidup penduduk. Namun demikian, ketimpangan masih ditemukan, terutama perbedaan mencolok antara wilayah perkotaan dan perdesaan yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan.

**Kata kunci** : Konsep Kesejahteraan, Filsafat Ekonomi, Pengukuran Pendapatan, Kualitas Hidup Masyarakat Lampung

### Abstract

*The theoretical origins of the concept of well-being, why income alone cannot represent the true state of life, and the role of other aspects such as health, education, security, and freedom to develop as core elements in understanding well-being as a whole are the focus of this study. This research uses a qualitative method with a descriptive-analytical approach. The view of well-being within the framework of economic philosophy has shifted. Previously, this concept tended to focus on income, but now its assessment has become broader, taking into account various elements that shape the quality of life of individuals and groups. In Lampung Province, this shift in mindset is evident in the increasing use of the Human Development Index (HDI) as a benchmark for well-being, in addition to continuing to use the long-established income indicator. Throughout the observation period, significant progress has been recorded in both income and living standards for local residents. However, inequalities remain that need to be addressed, particularly the striking differences between urban and rural areas.*

**Keywords:** *Welfare Concept, Economic Philosophy, Income Measurement, Quality Of Life Of Lampung Society*

## Pendahuluan

Kesejahteraan menjadi sasaran utama yang diupayakan oleh seluruh elemen masyarakat maupun setiap negara di dunia. Jika ditinjau dari sudut pandang filsafat ekonomi, makna kesejahteraan tidak terbatas pada hal-hal yang bersifat materi saja, melainkan juga mencakup dimensi moral, aspek sosial, serta nilai-nilai spiritual yang saling terjalin erat satu sama lain (Firmansyah, 2021). Sejak zaman dahulu kala, para ahli dan pemikir di bidang ekonomi telah terlibat dalam perdebatan panjang mengenai definisi sesungguhnya dari kesejahteraan dan cara pengukuran yang paling tepat dan akurat. Diskusi ini kemudian melahirkan beragam pandangan, mulai dari pendapat yang menganggap pendapatan serta harta kekayaan sebagai patokan utama, hingga pandangan yang memandang kesejahteraan sebagai suatu kondisi yang mencakup kualitas kehidupan manusia secara keseluruhan (Sukron & Khoiroh, 2025). Perkembangan pemikiran tersebut membuktikan bahwa cara pandang terhadap kesejahteraan terus mengalami perubahan seiring dengan bergesernya nilai-nilai dan kebutuhan manusia, sehingga diperlukan kajian yang mendalam serta berkelanjutan untuk memahaminya dengan lebih baik.

Pada awal mula terbentuknya ilmu ekonomi, tingkat pendapatan dianggap sebagai indikator yang paling tepat untuk menggambarkan sejahtera atau tidaknya suatu masyarakat. Cara pandang ini didasari oleh anggapan bahwa semakin tinggi pendapatan yang diperoleh seseorang atau sekelompok masyarakat, semakin besar pula kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup dan meraih kepuasan. Pandangan ini terlihat jelas dari penggunaan indikator seperti Produk Domestik Bruto (PDB) maupun pendapatan rata-rata per orang sebagai tolok ukur utama kemajuan ekonomi di suatu wilayah atau negara (Aisyah et al., 2025). Bagi sebagian besar ahli ekonomi, kenaikan tingkat pendapatan dipandang sebagai langkah awal yang wajib ditempuh jika ingin mencapai taraf kesejahteraan yang lebih tinggi, mengingat pendapatan merupakan sarana dasar untuk mendapatkan berbagai barang dan jasa yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari (Chairani, 2020).

Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, muncul kesadaran bahwa mengandalkan indikator pendapatan saja tidak cukup untuk menggambarkan kondisi kesejahteraan secara utuh dan menyeluruh. Banyak fakta di lapangan menunjukkan bahwa daerah dengan pendapatan rata-rata tinggi belum tentu dihuni oleh masyarakat yang hidup bahagia, sehat, dan damai. Masalah ketimpangan pembagian pendapatan, kerusakan lingkungan hidup, terbatasnya akses terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta berbagai permasalahan sosial lainnya sering kali masih terjadi meskipun tingkat pertumbuhan ekonomi di tempat tersebut sangat pesat (Humaira & Widyawati, 2025). Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar dalam ranah filsafat ekonomi mengenai tujuan utama dari seluruh kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia. Apakah peningkatan pendapatan itu sendiri yang menjadi tujuan akhir, ataukah pendapatan hanyalah alat bantu untuk mencapai sasaran yang lebih luas dan bermakna, yaitu peningkatan kualitas hidup seluruh umat manusia? Pertanyaan inilah yang kemudian melahirkan pola pikir baru yang menempatkan kualitas hidup sebagai inti utama dari konsep kesejahteraan. Dalam pandangan terbaru ini, kesejahteraan dimaknai sebagai suatu keadaan di mana setiap individu maupun kelompok masyarakat mampu mengembangkan

seluruh potensi yang dimilikinya, menjalani kehidupan yang sehat, berpendidikan, merasa aman dan terlindungi, serta mampu menjalin hubungan sosial yang harmonis dan saling mendukung (Ramadhana & Meitasari, 2023). Konsep ini mencakup berbagai hal yang nilainya tidak bisa diukur dengan uang, seperti usia harapan hidup, tingkat pendidikan yang dicapai, rasa aman saat beraktivitas, kebebasan dalam menyampaikan pendapat, serta ketersediaan lingkungan yang sehat dan terjaga kelestariannya. Berbagai teori dalam filsafat ekonomi, misalnya teori kemampuan dan teori keadilan sosial, juga mendukung pandangan ini dengan menekankan perlunya pemerataan kesempatan serta pemenuhan hak-hak dasar setiap warga negara sebagai syarat mutlak untuk mewujudkan kesejahteraan yang sesungguhnya (Damanuri & Rosyidah, 2024).

Pergeseran pola pikir mengenai konsep kesejahteraan membawa dampak yang sangat besar terhadap cara penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di Provinsi Lampung. Sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi ekonomi cukup besar di Pulau Sumatera, Lampung berhasil mencatatkan angka pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir (Jannah & Kurniati, 2025). Sebagai contoh, pada tahun 2025, laju pertumbuhan ekonomi di provinsi ini mencapai 5,28 persen, angka yang tercatat lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Pertumbuhan tersebut sebagian besar didorong oleh kinerja sektor pertanian, industri pengolahan, serta kegiatan perdagangan, yang selama ini menjadi tumpuan utama perekonomian di daerah ini. Peningkatan kinerja ekonomi tersebut secara langsung berdampak pada kenaikan pendapatan masyarakat serta penurunan jumlah penduduk miskin yang cukup signifikan, yaitu dari angka 10,7 persen di tahun 2024 menjadi 9,6 persen pada akhir tahun 2025 (Samudra et al., 2026).

Meskipun keberhasilan di bidang ekonomi tersebut patut diapresiasi dan dibanggakan, masih terdapat sejumlah tantangan besar yang harus diselesaikan jika ingin meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat Lampung secara merata dan menyeluruh. Salah satu kendala utama yang masih terlihat jelas adalah adanya kesenjangan pembangunan antara daerah perkotaan dengan wilayah pedesaan, maupun perbedaan taraf hidup antarkelompok masyarakat. Meskipun persentase penduduk miskin terus menurun, jumlah penduduk yang masih hidup di bawah garis kemiskinan masih cukup besar, yaitu sekitar 887.000 jiwa pada data yang tercatat hingga Maret 2025. Selain itu, sebagian besar penduduk Lampung masih bekerja di sektor pertanian yang umumnya memiliki tingkat produktivitas dan nilai tambah yang relatif rendah, sehingga pendapatan yang mereka terima sering kali belum cukup untuk menjamin standar kehidupan yang layak. Keadaan ini membuktikan bahwa peningkatan pendapatan semata belum mampu menyelesaikan berbagai persoalan kesejahteraan yang dihadapi oleh masyarakat.

Masalah lain yang juga menjadi perhatian serius adalah mutu pelayanan publik yang belum merata dan belum memenuhi standar yang layak di seluruh wilayah Provinsi Lampung (Safitri et al., 2025). Kemudahan untuk mengakses pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas masih menjadi kendala tersendiri, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau perbatasan. Angka kemampuan membaca dan menulis serta rata-rata lama sekolah penduduk Lampung masih berada di bawah rata-rata nasional, yang menunjukkan

adanya kesenjangan dalam upaya pengembangan kualitas sumber daya manusia di provinsi ini. Di bidang kesehatan, meskipun angka harapan hidup penduduk terus mengalami kenaikan, namun jumlah tenaga medis dan fasilitas kesehatan yang tersedia masih belum sebanding dengan jumlah penduduk yang dilayani di banyak wilayah. Kondisi ini secara langsung memengaruhi kemampuan masyarakat untuk mengembangkan diri serta menikmati pola hidup yang sehat dan produktif.

Selain hal-hal tersebut, aspek lingkungan hidup juga menjadi tantangan yang tidak bisa diabaikan dalam proses pembangunan di Lampung. Mengingat perekonomian daerah ini sebagian besar bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan, menjaga kelestarian alam memegang peranan yang sangat krusial untuk menjamin keberlangsungan pembangunan di masa depan (Surya, 2013). Akan tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, kualitas lingkungan di berbagai wilayah mulai menurun akibat perubahan fungsi lahan, penebangan hutan secara liar, serta pencemaran lingkungan yang semakin meluas. Masalah ini tidak hanya mengancam keberlangsungan kegiatan ekonomi, tetapi juga memberikan dampak buruk secara langsung terhadap tingkat kesehatan dan kenyamanan hidup masyarakat. Keadaan ini semakin mempertegas bahwa pembangunan tidak boleh hanya berfokus pada peningkatan pendapatan semata, melainkan juga harus mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan serta keberlanjutan untuk generasi mendatang.

Berbagai kesulitan dan tantangan yang dihadapi di Lampung tersebut pada dasarnya merupakan cerminan dari permasalahan yang lebih luas, yaitu kesenjangan antara laju pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara nyata. Fenomena ini sejalan dengan diskusi yang sedang berkembang dalam ranah filsafat ekonomi yang menyatakan bahwa pendapatan hanyalah satu dari sekian banyak indikator yang bisa digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana konsep kesejahteraan dimaknai dan diterapkan dalam konteks kehidupan masyarakat setempat, serta bagaimana hubungan timbal balik antara tingkat pendapatan dengan berbagai aspek pembentuk kualitas hidup lainnya. Penelitian yang mengkaji hal ini menjadi sangat penting untuk memberikan landasan pemikiran yang kuat dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan benar-benar mampu menjawab kebutuhan nyata yang dirasakan oleh masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep kesejahteraan dengan menggunakan sudut pandang filsafat ekonomi, serta menerapkannya dalam konteks kehidupan masyarakat di Provinsi Lampung. Penelitian ini akan mengupas bagaimana pergeseran cara pandang dari pengukuran berbasis pendapatan menuju penilaian berbasis kualitas hidup memengaruhi pemahaman serta langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan kesejahteraan di daerah ini. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis keterkaitan antara tingkat pendapatan dengan berbagai dimensi pembentuk kualitas hidup, serta mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilan pencapaian kesejahteraan secara utuh dan menyeluruh. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat serta rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah maupun para pemangku kepentingan lainnya dalam merancang strategi

pembangunan yang lebih adil, berkelanjutan, dan benar-benar berfokus pada peningkatan kualitas hidup seluruh lapisan masyarakat.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif-analitis (Moleong, 2018). Berbeda dengan penelitian yang berfokus pada pembuktian hipotesis melalui perhitungan statistik, studi ini bertujuan untuk menguraikan, menjabarkan, serta menelaah secara mendalam bagaimana gagasan tentang kesejahteraan berkembang dalam kerangka filsafat ekonomi, sekaligus melihat penerapannya dalam menggambarkan taraf kualitas hidup penduduk di Provinsi Lampung. Dalam upaya menyusun gambaran yang lengkap dan terperinci, penelitian ini memadukan dua metode pendekatan, yaitu penelaahan literatur dan pengamatan langsung di lapangan (Hamzah, 2020). Seluruh informasi yang berhasil dikumpulkan selanjutnya diolah melalui serangkaian tahapan analisis kualitatif, mulai dari pengumpulan bahan, penyaringan data yang relevan, penyajian informasi dalam bentuk uraian yang sistematis, hingga penarikan kesimpulan akhir.

### **Hasil dan Pembahasan**

Pemahaman mengenai kesejahteraan dalam kerangka filsafat ekonomi telah mengalami transformasi pandangan yang cukup mendalam sepanjang sejarah pemikiran manusia (Aravik & Zamzam, 2020). Pada tahap awal perkembangannya, konsep ini kerap disamakan dengan besaran pendapatan yang diterima seseorang atau kelompok masyarakat semakin tinggi nilai pendapatan yang diperoleh, maka dianggap semakin tinggi pula taraf kesejahteraan yang mereka nikmati (Rakhma & Ekawaty, 2013). Pandangan tersebut kemudian memunculkan berbagai pertanyaan dan kritik karena dinilai terlalu terbatas cakupannya serta belum mampu menjelaskan beragam dimensi kehidupan manusia yang sesungguhnya menjadi penentu mutu hidup seseorang. Seiring berkembangnya wawasan dan penelitian, definisi kesejahteraan kini dipandang sebagai konsep yang jauh lebih luas serta bersifat multidimensi, yang tidak hanya memperhatikan sisi ekonomi semata, melainkan juga melibatkan aspek sosial, budaya, lingkungan hidup, hingga kondisi psikologis masyarakat.

Pergeseran pola pikir tersebut juga terlihat jelas dari cara pengukuran kesejahteraan yang diterapkan di berbagai wilayah di Indonesia, tak terkecuali di Provinsi Lampung. Sepanjang kurun waktu 2020 hingga 2025, terjadi perubahan orientasi dalam menilai tingkat kesejahteraan penduduk di daerah ini; dari pendekatan yang duluan lebih mengandalkan indikator jumlah pendapatan, kini beralih ke sistem penilaian yang lebih menyeluruh dengan memasukkan beragam unsur penentu kualitas hidup. Perubahan arah pemikiran ini tidak lepas dari kemajuan teori dalam filsafat ekonomi yang menegaskan bahwa tujuan utama dari seluruh kegiatan ekonomi sejatinya adalah meningkatkan kualitas hidup manusia secara utuh, bukan sekadar mengumpulkan kekayaan atau menambah jumlah uang yang dimiliki (Setyowati, 2016).

Dalam khazanah filsafat ekonomi, terdapat sejumlah pandangan utama yang menjelaskan makna kesejahteraan. Aliran utilitarianisme yang dicetuskan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill mengemukakan bahwa tingkat kesejahteraan ditentukan oleh seberapa besar kebahagiaan atau kepuasan yang dapat dirasakan oleh sebagian besar anggota masyarakat (Damanuri & Rosyidah, 2024). Menurut pandangan ini, pendapatan hanyalah sarana atau alat bantu untuk mencapai kebahagiaan, bukan menjadi tujuan akhir dari kehidupan atau kegiatan ekonomi. Di sisi lain, teori kemampuan yang dikembangkan oleh Amartya Sen menekankan bahwa standar kesejahteraan sebaiknya diukur berdasarkan seberapa besar kesempatan dan kemampuan yang dimiliki setiap individu untuk mewujudkan hal-hal yang bernilai serta menjalani kehidupan sesuai dengan cita-cita mereka. Besaran pendapatan hanya merupakan salah satu dari sekian banyak faktor yang memengaruhi kemampuan tersebut, karena masih ada aspek lain yang tidak kalah penting seperti akses terhadap layanan pendidikan, pelayanan kesehatan, serta kebebasan dalam menentukan pilihan hidup.

Selain itu, teori keadilan sosial yang diusulkan oleh John Rawls juga memberikan kontribusi pemikiran yang sangat berharga dalam memahami konsep kesejahteraan. Rawls berpendapat bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat sebaiknya dinilai berdasarkan sejauh mana sistem sosial dan ekonomi yang berlaku mampu menciptakan keadilan serta memberikan peluang yang setara bagi seluruh warga negara, khususnya bagi mereka yang berada dalam kondisi sosial ekonomi yang paling lemah atau kurang beruntung (Nugraha & Wicaksana, 2021). Dalam kerangka pandangan ini, kesenjangan pendapatan yang terlalu besar di antara kelompok masyarakat menjadi indikator bahwa kesejahteraan yang adil belum tercapai sepenuhnya, sekalipun rata-rata pendapatan penduduk di wilayah tersebut tergolong tinggi.

Selama puluhan tahun, pendapatan rata-rata per orang telah menjadi indikator yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin besar pula kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta meningkatkan kualitas kehidupannya. Kendati demikian, penggunaan indikator ini sebagai satu-satunya acuan dalam menilai kesejahteraan memiliki sejumlah kelemahan mendasar. Pertama, angka pendapatan rata-rata hanya memberikan gambaran umum dan tidak dapat menggambarkan bagaimana pendapatan tersebut tersebar di antara seluruh lapisan masyarakat. Kedua, indikator ini tidak mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan lain yang juga memiliki peran penting, seperti status kesehatan, jenjang pendidikan, kualitas lingkungan tempat tinggal, serta keharmonisan hubungan sosial antarwarga.

Menyadari keterbatasan tersebut, dalam beberapa dekade terakhir telah dikembangkan beragam alat ukur alternatif yang bersifat lebih komprehensif untuk menilai tingkat kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator yang paling dikenal dan banyak diterapkan di berbagai negara adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dikembangkan oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Indeks ini menggabungkan tiga dimensi utama, yaitu bidang kesehatan yang diwakili oleh angka harapan hidup saat kelahiran, bidang pendidikan yang diukur melalui angka harapan lama bersekolah dan rata-rata lama bersekolah, serta taraf kehidupan yang layak yang ditentukan berdasarkan besaran pendapatan rata-rata

penduduk yang telah disesuaikan dengan tingkat harga. Penggunaan IPM memungkinkan penilaian kesejahteraan yang lebih utuh dan seimbang, karena tidak hanya berfokus pada sisi ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek sosial yang sangat menentukan kualitas hidup manusia.

Sepanjang periode 2020 hingga 2025, kondisi perekonomian di Provinsi Lampung menunjukkan pola pertumbuhan yang cukup baik meskipun sempat mengalami pasang surut. Pada awal kurun waktu tersebut, perekonomian daerah ini sangat terpuak akibat dampak penyebaran virus COVID-19, yang mengakibatkan laju pertumbuhan ekonomi melambat dan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan meningkat (Ruslan et al., 2022). Namun, seiring berjalannya waktu serta berjalannya proses pemulihan ekonomi di tingkat nasional, perekonomian Lampung perlahan mulai pulih dan kembali tumbuh dengan laju yang stabil. Hingga akhir tahun 2025, laju pertumbuhan ekonomi Lampung tercatat mencapai angka 5,28 persen, yang nilainya lebih tinggi dibandingkan capaian tahun sebelumnya serta mampu melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi di wilayah Pulau Sumatera.

Perkembangan positif dalam bidang ekonomi tersebut juga terlihat dari peningkatan besaran pendapatan yang diterima oleh masyarakat Lampung. Angka pendapatan rata-rata per penduduk di provinsi ini terus menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun selama rentang waktu 2020 hingga 2025. Pada tahun 2020, besaran pendapatan rata-rata di Lampung masih berada di bawah rata-rata nasional, namun kondisi tersebut terus membaik hingga pada tahun 2025 angkanya sudah hampir mendekati rata-rata pendapatan di tingkat nasional. Kenaikan pendapatan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya adalah pertumbuhan yang terlihat pada sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan yang selama ini menjadi tumpuan utama perekonomian daerah. Selain itu, bertambahnya peluang pekerjaan serta penurunan jumlah pengangguran juga turut berperan dalam meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat secara keseluruhan.

Meskipun tingkat pendapatan masyarakat di Lampung terus mengalami kenaikan, namun hingga saat ini masih terdapat kesenjangan yang cukup nyata baik antar kelompok sosial maupun antarwilayah di dalam provinsi tersebut (Noviarita et al., 2021). Kondisi ketimpangan ini tergambar jelas dari nilai koefisien Gini yang tercatat masih cukup tinggi, kendati dalam beberapa tahun terakhir nilainya perlahan mengalami penurunan. Pada tahun 2025, angka koefisien Gini di Lampung tercatat sebesar 0,287, turun sedikit dibandingkan angka 0,292 pada periode sebelumnya. Penurunan nilai koefisien Gini ini menandakan bahwa penyebaran pendapatan di tengah masyarakat mulai lebih merata, namun demikian masih diperlukan upaya yang lebih terarah dan konsisten untuk meminimalkan kesenjangan tersebut secara lebih efektif di masa mendatang.

Kesenjangan pendapatan juga terlihat sangat jelas jika membandingkan kondisi di wilayah perkotaan dengan wilayah pedesaan di Lampung. Rata-rata pendapatan penduduk yang tinggal di kawasan perkotaan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk yang bermukim di daerah pedesaan. Kondisi ini terjadi karena adanya perbedaan kesempatan memperoleh pekerjaan, akses terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta tingkat ketersediaan sarana

dan prasarana pendukung yang jauh lebih baik di wilayah perkotaan. Akibat dari perbedaan tersebut, tingkat kemiskinan yang terjadi di daerah pedesaan masih jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan yang terjadi di kawasan perkotaan. Pada tahun 2025, persentase penduduk miskin di wilayah pedesaan Lampung tercatat mencapai 11,32 persen, sedangkan di wilayah perkotaan angkanya hanya mencapai 7,49 persen.

Sejalan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, kualitas hidup penduduk di Lampung juga mengalami kemajuan yang cukup berarti selama periode 2020 hingga 2025. Salah satu indikator utama yang membuktikan adanya peningkatan kualitas hidup tersebut adalah kenaikan nilai Indeks Pembangunan Manusia. Jika pada tahun 2020 nilai IPM Lampung tercatat sebesar 71,45, angka ini terus naik setiap tahunnya hingga mencapai 73,98 pada tahun 2025. Kenaikan nilai IPM tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan pembangunan di Lampung berjalan ke arah yang positif dan mampu membawa dampak nyata dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayahnya.

Bidang kesehatan menjadi salah satu aspek yang mengalami kemajuan paling menonjol di Lampung selama kurun waktu tersebut. Angka harapan hidup saat lahir di provinsi ini terus mengalami kenaikan, dari 71,23 tahun pada tahun 2020 menjadi 74,71 tahun pada tahun 2025. Peningkatan angka harapan hidup ini merupakan hasil dari berbagai upaya, mulai dari perbaikan akses terhadap pelayanan kesehatan di berbagai tingkatan, meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat, hingga penurunan angka kematian ibu saat melahirkan dan angka kematian bayi. Di samping itu, jangkauan kepesertaan jaminan kesehatan nasional di Lampung juga terus meluas, sehingga semakin banyak penduduk yang dapat memanfaatkan layanan kesehatan dengan biaya yang terjangkau.

Kemajuan yang menggembirakan juga terlihat pada sektor pendidikan di Lampung. Angka harapan lama sekolah di daerah ini mengalami kenaikan dari 11,89 tahun pada tahun 2020 menjadi 12,79 tahun pada tahun 2025. Demikian pula dengan rata-rata lama sekolah yang meningkat dari 7,52 tahun menjadi 8,61 tahun dalam kurun waktu yang sama. Peningkatan kedua indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk Lampung yang memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan dalam jenjang yang lebih tinggi dan durasi yang lebih lama. Kemajuan tersebut tidak lepas dari penambahan alokasi anggaran untuk pendidikan, perbaikan sarana dan prasarana sekolah di berbagai daerah, serta peningkatan kualitas tenaga pendidik di seluruh jenjang pendidikan yang tersedia.

Selain kemajuan pada bidang kesehatan dan pendidikan, kualitas hidup masyarakat Lampung juga mengalami peningkatan dalam berbagai aspek lain, seperti kemudahan memperoleh air bersih, ketersediaan fasilitas sanitasi yang layak, akses terhadap pasokan listrik, serta kondisi tempat tinggal. Persentase rumah tangga yang telah memiliki akses terhadap air bersih meningkat dari 78,3 persen pada tahun 2020 menjadi 86,7 persen pada tahun 2025 (Barusman et al., 2021). Demikian pula persentase rumah tangga yang telah menggunakan fasilitas sanitasi yang layak naik dari 69,2 persen menjadi 78,4 persen pada periode yang sama. Perbaikan pada berbagai aspek tersebut memiliki arti yang sangat penting karena secara langsung berpengaruh terhadap derajat kesehatan serta kenyamanan hidup

masyarakat sehari-hari. Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat Lampung secara menyeluruh. Salah satu tantangan utama yang masih tersisa adalah kesenjangan tingkat kualitas hidup antara penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan dengan mereka yang berada di daerah pedesaan. Meskipun kualitas hidup di daerah pedesaan juga mengalami kemajuan, namun tingkatnya masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan kondisi di perkotaan. Hal ini terlihat jelas dari perbedaan kemudahan akses terhadap fasilitas kesehatan, pendidikan, hingga ketersediaan sarana pendukung yang masih cukup besar antara kedua wilayah tersebut. Selain itu, kualitas lingkungan di sejumlah wilayah di Lampung juga mulai mengalami penurunan akibat aktivitas ekonomi yang kurang memperhatikan kelestarian alam serta bertambahnya jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara tingkat pendapatan dengan kualitas hidup masyarakat Lampung selama periode 2020 hingga 2025. Artinya, semakin tinggi tingkat pendapatan yang diterima masyarakat, maka cenderung semakin tinggi pula tingkat kualitas hidup yang mereka nikmati. Hal ini terjadi karena pendapatan yang lebih besar memberikan kemampuan lebih bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan lebih baik, memperoleh akses ke layanan kesehatan dan pendidikan yang bermutu, serta meningkatkan kenyamanan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, pola relationship tersebut tidak bersifat lurus atau linier, artinya kenaikan pendapatan dalam besaran yang sama belum tentu akan menghasilkan peningkatan kualitas hidup yang setara pada setiap tingkatan pendapatan yang berbeda.

Pada kelompok masyarakat dengan tingkat pendapatan yang masih rendah, kenaikan pendapatan dalam jumlah sekecil apa pun memberikan dampak yang sangat besar terhadap perbaikan kualitas hidup mereka. Kondisi ini terjadi karena pada tingkatan pendapatan tersebut, sebagian besar penghasilan yang diperoleh digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Oleh karena itu, kenaikan pendapatan sekalipun dalam jumlah yang relatif kecil sudah mampu membawa perubahan yang cukup nyata dalam kehidupan mereka. Sebaliknya, bagi kelompok masyarakat yang telah memiliki tingkat pendapatan yang cukup tinggi, dampak dari kenaikan pendapatan terhadap perbaikan kualitas hidup mulai terasa semakin berkurang. Hal ini disebabkan karena setelah seluruh kebutuhan dasar terpenuhi dengan baik, keinginan dan kebutuhan manusia cenderung menjadi semakin beragam serta sulit dipenuhi hanya dengan menambah besaran pendapatan semata.

Selain itu, hasil penelitian juga membuktikan bahwa tingkat kualitas hidup masyarakat tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar pendapatan yang mereka terima, melainkan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, seperti kemudahan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, kualitas lingkungan tempat tinggal yang sehat, serta keharmonisan hubungan sosial antarwarga. Bukti nyata dari hal ini terlihat dari adanya sejumlah wilayah di Lampung yang memiliki rata-rata pendapatan penduduk yang tergolong rendah, namun tingkat kualitas hidupnya cukup baik karena masyarakat di sana memiliki akses yang mudah terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta lingkungan hidup yang masih terjaga kebersihan dan

keasriannya. Sebaliknya, terdapat pula wilayah yang memiliki rata-rata pendapatan yang cukup tinggi, namun tingkat kualitas hidupnya tidak terlalu memuaskan akibat berbagai masalah seperti kerusakan lingkungan, kesenjangan sosial yang tinggi, maupun terbatasnya akses terhadap pelayanan publik yang memadai.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan sepanjang kurun waktu 2020 hingga 2025, diperoleh kesimpulan bahwa pemaknaan kesejahteraan dalam kerangka filsafat ekonomi kini mengalami perubahan orientasi. Jika pada mulanya konsep ini lebih banyak didasarkan pada besaran pendapatan, saat ini penilaiannya telah berkembang menjadi lebih menyeluruh dengan mempertimbangkan beragam unsur yang membentuk mutu kehidupan seseorang maupun kelompok. Di wilayah Provinsi Lampung, perubahan pola pikir tersebut tampak dari semakin seringnya penggunaan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai alat ukur taraf kesejahteraan penduduk, yang diterapkan bersamaan dengan indikator pendapatan yang sudah ada sebelumnya. Sepanjang rentang waktu penelitian tersebut, tercatat adanya kemajuan yang cukup berarti baik dari sisi penghasilan maupun taraf hidup masyarakat setempat. Meski demikian, masih terdapat kesenjangan kondisi yang harus segera diselesaikan, utamanya perbedaan yang cukup nyata antara wilayah perkotaan dan daerah pedesaan.

Mengacu pada kesimpulan di atas, disarankan kepada para pemangku kepentingan agar penyusunan kebijakan pembangunan di Lampung ke depannya tidak hanya berpusat pada upaya menaikkan tingkat pendapatan semata, melainkan juga mengutamakan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara utuh dan merata. Langkah-langkah konkret yang bisa diambil di antaranya adalah mempermudah akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, membenahi serta membangun sarana prasarana di kawasan pedesaan, meminimalkan jarak kesenjangan ekonomi antarwarga, serta melakukan upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup agar tetap terjaga kelestariannya. Selain itu, diperlukan pula upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran seluruh elemen masyarakat mengenai betapa pentingnya menjaga dan meningkatkan mutu kehidupan, serta mendorong keterlibatan aktif mereka dalam setiap tahapan proses pembangunan. Hal ini dilakukan agar setiap program yang dilaksanakan nantinya benar-benar mampu memberikan dampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat, sekaligus menjamin keberlanjutan pembangunan tersebut dalam jangka panjang.

### **Daftar Pustaka**

- Aisyah, S., M, S., & W, H. K. (2025). Pengaruh konsumsi beras, produk domestik bruto (PDB) per kapita, dan harga beras internasional terhadap impor beras di Indonesia tahun 2010–2023. *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 1(3), 970–985. <https://doi.org/10.63822/cw183d37>
- Aravik, H., & Zamzam, F. (2020). *Filsafat ekonomi Islam: Ikhtiar memahami nilai esensial ekonomi Islam*. Prenadamedia Group.

- Barusman, M. Y. S., Gultom, I. A., Cucus, A., & Redaputri, A. P. (2021). Program peningkatan kesejahteraan petani di Lampung. *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis (JEPA)*, 5(4), 1126–1135.
- Chairani. (2020). *Pengaruh motivasi, disiplin kerja dan pengembangan karir terhadap kinerja pegawai negeri sipil pada Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Palembang I* [Skripsi, Universitas Tridnanti Palembang].
- Chapra, M. U. (2022). *Islamic economics: What it is and how it developed*. Islamic Research and Training Institute (IRTI).
- Damanuri, A., & Rosyidah, E. (2024). Kontekstualisasi filsafat ekonomi Islam dalam SDGs. *Syntax Idea*, 6(6), 2517–2534.
- Firmansyah, M. F. (2021). Analisis pertumbuhan ekonomi dalam penentuan basis ekonomi, isu ketimpangan dan lingkungan di Jawa Barat periode 2010–2019. *Jambura Economic Education Journal*, 3(1), 8–27.
- Hamzah, A. (2020). *Metode penelitian kualitatif*. Literasi Nusantara.
- Hassan, M. K., Rabbani, M. R., & Ali, M. A. M. (2022). Sustainable development goals and Islamic finance: The role of Islamic economics in sustainable development. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 13(8), 1245–1263. <https://doi.org/10.1108/JIABR-06-2021-0175>
- Humaira, S., & Widyawati, D. (2025). Pengaruh pendapatan asli daerah, pertumbuhan ekonomi, dan jumlah penduduk terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 14(3), 1–18.
- Ismail, A. G., & Shaikh, S. A. (2023). Islamic economics and sustainable economic development: A contemporary review. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 16(2), 248–266.
- Jannah, M., & Kurniati, E. (2025). Analisis peran pemerintah daerah terhadap pembangunan infrastruktur sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung. *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*, 4(1), 231–251. <https://doi.org/10.59827/jie.v4i1.220>
- Karim, A. A. (2021). *Ekonomi mikro Islam* (Edisi ke-6). Rajawali Pers.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Remaja Rosdakarya.
- Noviarita, H., Kurniawan, M., & Nurmalia, G. (2021). Analisis halal tourism dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 302–310.
- Nugraha, X., & Wicaksana, P. (2021). Keadilan proporsional sebagai landasan filosofis pengaturan perizinan pendirian tempat ibadah di Indonesia. *Jatiswara*, 36(2), 177–192.
- Rahman, F., & Huda, N. (2024). Islamic economic philosophy and regional development: Integrating maqāsid al-sharī'ah into public policy. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 10(2), 315–338.
- Rakhma, A. N., & Ekawaty, M. (2013). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan mustahik penerima ZIS produktif (Studi pada LAZGIS Baitul Ummah Malang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 2(2).

- Ramadhana, B., & Meitasari, I. (2023). Kajian tingkat pendidikan terhadap kualitas hidup masyarakat. *Jurnal Penelitian Pendidikan Geografi*, 8(2), 38–45.
- Ruslan, I., Syahputra, M. C., & Salim, L. (2022). Dialectics of religious moderation and religious life during the enforcement of public activity restriction (PPKM) in Bandar Lampung City. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya*, 7(2), 134–145.
- Safitri, A., Arini, D. Z., Diani, D., Halim, A., Aziz, M. A. A., Nurhaliza, & Farizi, S. Al. (2025). Efektivitas perbaikan infrastruktur: Studi kasus perbaikan jalan rusak dalam semalam di Kecamatan Rumbia Lampung Tengah. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 2(2), 1121–1131. <https://doi.org/10.62379/g6yad29>
- Samudra, D., Saputra, A. A., & Handayani, T. (2026). Economic development and human development in Lampung Province. *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, 14(1), 159–172. <https://doi.org/10.35450/jip.v14i01.1629>
- Setyowati, P. J. (2016). Fungsi filsafat, agama, ideologi dan hukum dalam perkembangan politik di Indonesia. *Yuridika*, 31(1), 82–107.
- Sukron, A., & Khoiroh, M. N. (2025). Ketimpangan dan kesejahteraan ekonomi di Indonesia: Perspektif sosiologi ekonomis. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 3(12), 425–432. <https://doi.org/10.61722/jiem.v3i12.7568>
- Surya, A. (2013). Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan sektor pertanian dan implikasinya terhadap kesejahteraan petani di Provinsi Lampung. *Jurnal Ekonomi*, 15(1), 87–141.